

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di hutan produksi dan hutan lindung saja tetapi juga terjadi di kawasan konservasi. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang memiliki ekosistem yang masih murni/alami dan juga banyak dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki daya tarik tersendiri dan menarik untuk dikunjungi (Sinery, 2015). Kawasan konservasi diperuntukkan bagi pengawetan atau penjagaan keberagaman tumbuhan, satwa, serta kondisi ekosistemnya. Beragam upaya dikerahkan untuk memelihara kelestarian hayati di negeri khatulistiwa. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hayati di Indonesia yaitu pengadaan kawasan hutan konservasi (Deandra, 2021). Kawasan ini diperlukan dalam rangka perlindungan terhadap kawasan bersejarah termasuk mengendalikan perkembangan kawasan tersebut agar identitasnya dan kebudayaannya tidak hilang. Kawasan ini dapat diberdayakan melalui media advertising, entertainment, dan tourism yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, agar kawasan tersebut dapat menghidupi dirinya sendiri dan selebihnya dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat (Hendro, 2015). Kelestarian kawasan konservasi perlu dijaga karena memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kerusakan kawasan konservasi biasanya disebabkan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi karena pada umumnya tempat tinggal masyarakat berbatasan langsung dengan kawasan konservasi dan melakukan aktivitas yang berdampak langsung dengan kawasan konservasi, sehingga aktivitas ini dapat mengancam kawasan konservasi. (Nordiansyah, 2016)

Desa Teromu merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Desa Teromu terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Tegalrejo, Dusun Mangkutana, dan Dusun Kawanga. Wilayah Desa Teromu merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang juga terdapat bendungan irigasi Kalaena yang mengairi kurang lebih 18.000 ha persawahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang juga diapit oleh Cagar Alam Faruhumpenai, Cagar Alam Ponda-ponda dan Cagar Alam Kalaena (Desa Teromu, 2023)

Masyarakat yang tinggal di Desa Teromu merupakan masyarakat yang bermukim dan berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda sampai sekarang mereka masih bergantung dari hasil ladang berpindah dan bercocok tanam pada kawasan konservasi. Selain itu mereka juga melakukan perambahan kawasan konservasi dengan mengambil sejumlah hasil hutan baik itu hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan mencemari jasa lingkungan sehingga merusak

ekosistem pada kawasan konservasi.

Dengan melihat kerusakan yang terjadi pada kawasan konservasi, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Sulawesi Selatan selaku pihak yang bertanggungjawab atas kawasan konservasi (Cagar Alam Faruhumpenai, Cagar Alam Kalaena dan Cagar Alam Ponda-ponda) berinisiatif melakukan pembinaan dalam rangka meminimalisir kerusakan kawasan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, Oleh karena itu Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan melakukan kegiatan pendampingan masyarakat dengan membentuk kelompok pemberdayaan melalui kemitraan konservasi. .

Berdasarkan P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestraian Alam (KPA) pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemberian akses (pemungutan HHBK, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas), serta kerjasama antara kepala unit atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat (kelompok tani yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana pihak pertama yakni Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Sulawesi Selatan dan pihak kedua yakni masyarakat setempat (kelompok tani yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan).

Namun kenyataannya program kemitraan konservasi dinilai masih kurang dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan strategi pemberdayaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat pada kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan konservasi di Desa Teromu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ?
2. Strategi pemberdayaan apa yang digunakan dalam merumuskan strategi pada kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan konservasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi dengan menggunakan analisis AHP

2. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi dengan menggunakan analisis SWOT.

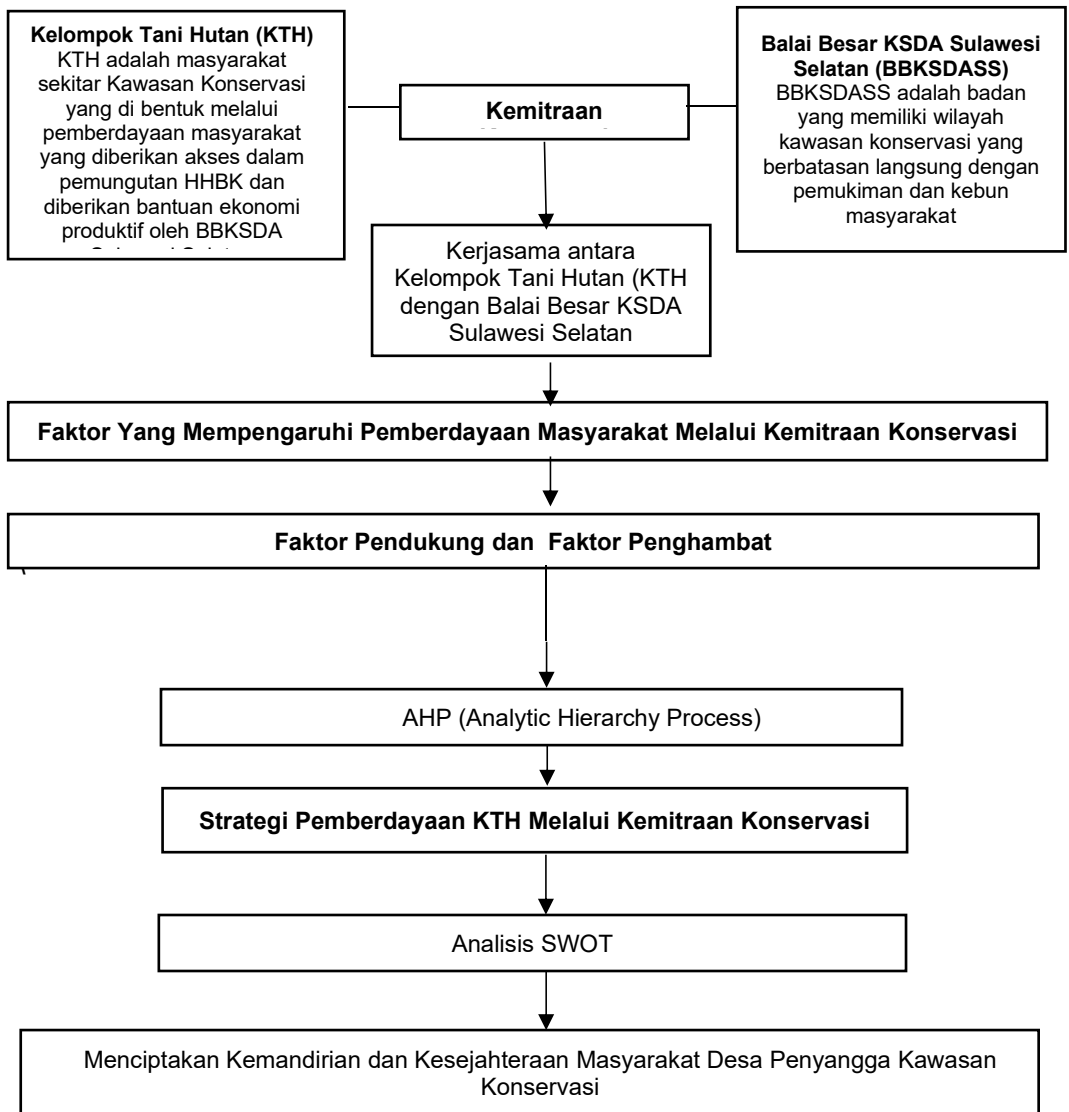
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Masukan bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga kawasan konservasi dalam hal peningkatan kapasitas diri, peningkatan kesadaran dan ketidakberdayaan
2. Masukan bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan khususnya kawasan konservasi yang ekosistemnya masih murni dan belum banyak dirambah oleh manusia
3. Masukan bagi pihak terkait manfaat dari kegiatan pemberdayaan itu sendiri

1.5 Definisi Operasional

1. Pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya
2. Kelompok tani hutan adalah sekumpulan/sekelompok petani yang mengelola usaha dalam bidang kehutanan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan azas kekeluargaan, kesejahteraan, kesetaraan, partisipasi serta keswadayaan
3. Kemitraan konservasi program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaannya



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PEMBERDAYAAN KTH MELALUI KEMITRAAN KONSERVASI MENGGUNAKAN AHP

2.1 Abstrak

Kemitraan konservasi akan membuka lebar peluang berusaha dan informasi pasar, antara lain dengan menekan hambatan birokrasi. Sektor kehutanan harus berupaya untuk memperkuat jejaring usaha dan manajemen ditingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan ditingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumberdaya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan. Penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan melalui kemitraan konservasi. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan melalui kemitraan konservasi dianalisis menggunakan AHP untuk memperoleh bobot, nilai dan skor. Hasil skor dari faktor pendorong yang menjadi prioritas yaitu indikator bantuan usaha ekonomi produktif dan faktor penghambat tertinggi yang menjadi prioritas yaitu indikator kurangnya tenaga penyuluh kehutanan.

2.2. Pendahuluan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan/kemampuan, dilihat dari pengertiannya maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses untuk mendapatkan kekuatan/daya/kemampuan, dan juga suatu proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya terhadap pihak yang kurang maupun belum berdaya (Sulistiyan, 2017). Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai suatu usaha dalam memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) bagi seluruh masyarakat (Mardikanto, 2017). Dalam arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya (Sulekale, 2022)

Menurut Mardikanto (2017) melihat dari beberapa definisi pemberdayaan ini, intinya tertuju pada usaha perbaikan, paling utama pada perbaikan kualitas hidup manusia, baik dari segi materi, moral, ekonomi maupun sosial budayanya. Melihat dari konsep tersebut, maka dari itu tujuan dari pemberdayaan memiliki beberapa ruang lingkup perbaikan meliputi:

- a. Perbaikan pendidikan (better education)
- b. Perbaikan kelembagaan (better institution)
- c. Perbaikan aksesibilitas (better accesbility)
- d. Perbaikan pendapatan (better income)
- e. Perbaikan lingkungan (better environment)
- f. Perbaikan tindakan (better action)
- g. Perbaikan masyarakat (better community)
- h. Perbaikan usaha (better business)
- i. Perbaikan kehidupan (better living),

Prinsip merupakan pernyataan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang konsisten. Oleh karena itu, prinsip tersebut akan diterima secara universal, dan dianggap benar dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan yang benar (Muslim, 2012). Menurut Sutrisno dalam Kusmana (2019) ada 5 (lima) prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (bottom up approach) yakni dii kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai yang selanjutnya dalam mengembangkan gagasan serta berbagai kegiatan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (participation) merupakan keterlibatan setiap aktor dan mereka mempunyai kekuasaan di setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

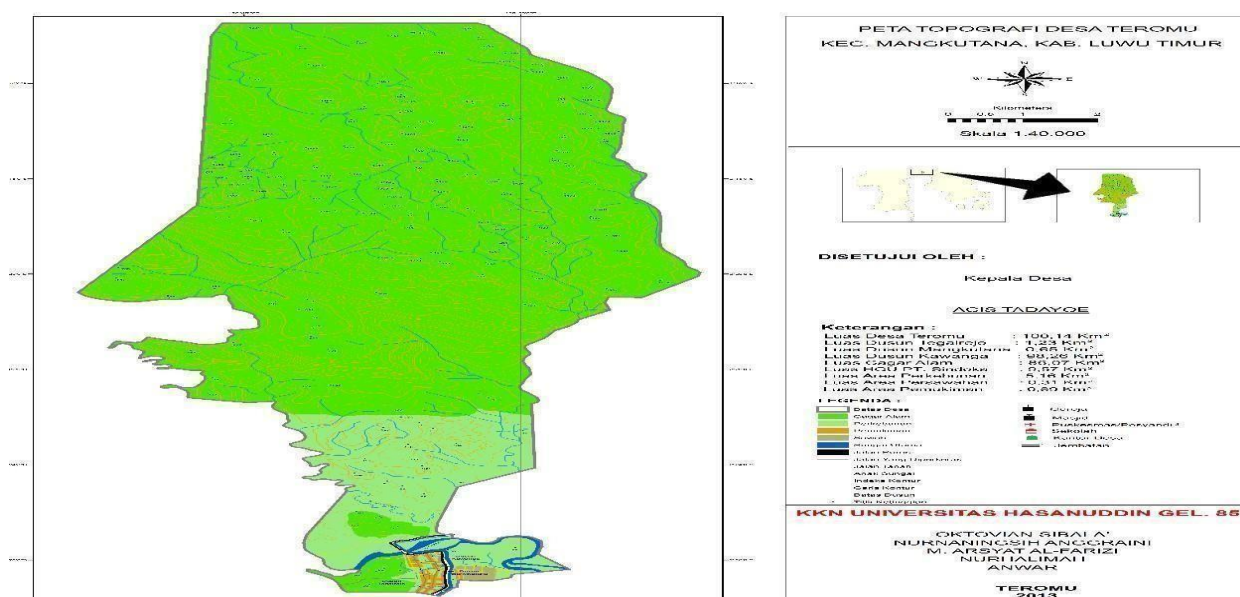
- c. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan beserta seluruh lapisan masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan sehingga dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan sebuah pernyataan kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan

Kelompok Tani Hutan adalah sekumpulan/sekelompok petani yang mengelola usaha dalam bidang kehutanan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan azas kekeluargaan, kesejahteraan, kesetaraan, partisipasi serta keswadayaan. Upaya pembentukan KTH yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Konservasi. Adanya pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan konservasi diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya hutan secara optimal, adil serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permenhut, 2014).

Kemitraan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk membangun suatu ikatan kerja sama berdasarkan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam suatu bidang usaha tertentu atau mencapai suatu tujuan tertentu guna memperoleh hasil yang lebih baik Gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, merupakan inti dari kemitraan (Coristya et al., 2013). Kemitraan konservasi merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaannya. Kemitraan konservasi akan membuka lebar peluang berusaha dan informasi pasar, antara lain dengan menekan hambatan birokrasi. Sektor kehutanan harus berupaya untuk memperkuat jejaring usaha dan manajemen ditingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan ditingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumberdaya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan (Saipurrozi et al. 2018).

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April sampai Bulan Juni 2024 i di Desa Teromu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini merupakan salah satu desa penyangga yang diberdayakan melalui kemitraan konsevasi. Lokasi penelitian dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Peta Lokasi Penelitian

Bahan dan Alat yang digunakan adalah kuisioner, alat tulis, dan kamera/handphone. Penentuan responden menggunakan teknik sensus, dimana responden adalah seluruh anggota kelompok tani hutan yang tinggal di sekitar kawasan konservasi Desa Teromu Kecamatan

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah responden yakni berjumlah 27 orang dan juga melibatkan 4 orang pakar dalam penentuan nilai bobot dari beberapa variabel faktor pendorong dan penghambat.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden menggunakan kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dikumpulkan melalui :

- Observasi lapangan yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan
- Wawancara terstruktur yaitu dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab kepada responden
- Studi literatur referensi yang berkaitan dengan penelitian

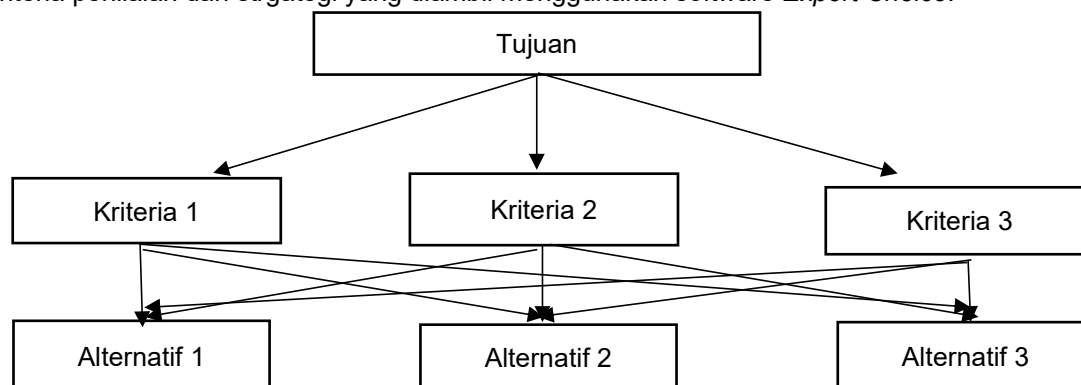
Dalam menentukan faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan melalui kemitraan konservasi dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Inventarisasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan melalui Kemitraan Konservasi

Variabel Pendorong	Bobot	Rating	Skor
Juknis pelaksanaan kegiatan			
Dst			

Variabel Penghambat	Bobot	Rating	Skor
Jaringan internet tidak stabil			
Dst			

Setelah penentuan faktor pendorong dan penghambat selanjutnya dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling prioritas dalam upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan skala 1-9 yang kemudian dibentuk menjadi sebuah hierarki proses pengambilan keputusan dimana tiap unsurnya saling berhubungan. Tiga komponen dalam penentuan hierarki yakni tujuan yang ingin dicapai, kriteria penilaian dan strategi yang diambil menggunakan software *Expert Choice*.



Gambar 2.2. Hierarki AHP

Langkah-langkah Pengolahan Data dengan Expert Choice :

1) Langkah I (Pembuatan dan Penyimpanan File)

- Buka aplikasi Expert Choice 11, dengan klik 2 kali pada icon EC. Selanjutnya akan muncul window atau screen selamat datang "Welcome to Expert Choice"
- Pada window ini, klik *Create new model*, direct lalu klik OK. Kemudian akan muncul Window penyimpanan untuk file baru yang akan kita buat. Isikan nama file sesuai dengan keinginan, pada kali nama file diisi dengan faktor pendorong. kemudian klik Open.
- Setelah itu akan muncul *window Goal Description*. Pada window ini sisikan secara singkat deskripsi tujuan atau goal yang ingin dicapai, kali ini saya memakai indikator faktor pendorong dan penghambat.
- Setelah mengisi deskripsi selanjutnya klik OK, lalu akan muncul window ruang kerja dengan sebuah Node yang merupakan hirarki level utama atau goal yang ingin dicapai.

2) Langkah 2 (Penyusunan Hierarki)

- Perhatikan kembali susunan hierarki kriteria pada analisis secara manual, pada hierarki II kriteria yang digunakan dimasukkan sebagai anak atau turunan hierarki I dengan Klik Kanan pada Node hierarki I, kemudian pilih Insert Child of Current Node.
- Masukkan kriteria pertama: faktor pendorong dan penghambat. tekan enter lalu klik bebas di ruang kerja.
- Setelah semua kriteria dimasukan, langkah selanjutnya dengan langkah yang sama memasukkan sub kriteria kepada masing-masing kriteria

3) Langkah 3 (Pembobotan Kriteria)

Sebagaimana prosedur yang dilakukan pada analisis manual, tahap pembobotan pertama dilakukan pada hierarki II terhadap hierarki I. Artinya kita ingin memberikan bobot terhadap masing-masing kriteria untuk mengetahui kriteria mana yang paling diunggulkan. Pada analisis manual sebelumnya diketahui bahwa hasil pembobotan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai hasil pembobotan ini akan dimasukkan kedalam program EC. Pertama klik pada Node utama atau Goal pada kolom bagian kiri. Lalu Klik Assessment pada tool bar window, kemudian pilih pairwise.
- b. Selanjutnya akan muncul window compare the relative preference with respect to: Goal
- c. Selanjutnya lakukan pengisian untuk kolom-kolom lain sebagaimana prosedur tersebut dan jika pembobotan selesai, klik Calculate.
- d. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar (Sasono, I. dkk. 2023).
- e. Menurut Tom Saaty (1980), rasio inkonsistensi sekitar 10% atau kurang adalah hal yang wajar

4) Langkah 4 (Rating)

Dalam penentuan nilai rating pada tiap variabel harus memiliki dasar dan bukti yang akurat. Penentuan nilai rating dilakukan dengan membandingkan kondisi atribut dengan memberikan penilaian berdasarkan tingkat kepentingan dengan angka 1 (tidak penting), angka 2 (kurang penting), angka 3 (cukup penting), angka 4 (penting) dan angka 5 (sangat penting), begitu juga halnya dengan faktor penghambat (Ansahri, 2023)

5) Langkah 5 (Skor)

Menurut Ansahri (2023) dalam menentukan nilai skor yang diperoleh dengan rumus

$$S = B \times R$$

Dimana, S = Skor

B = Bobot (hasil penilaian para pakar)

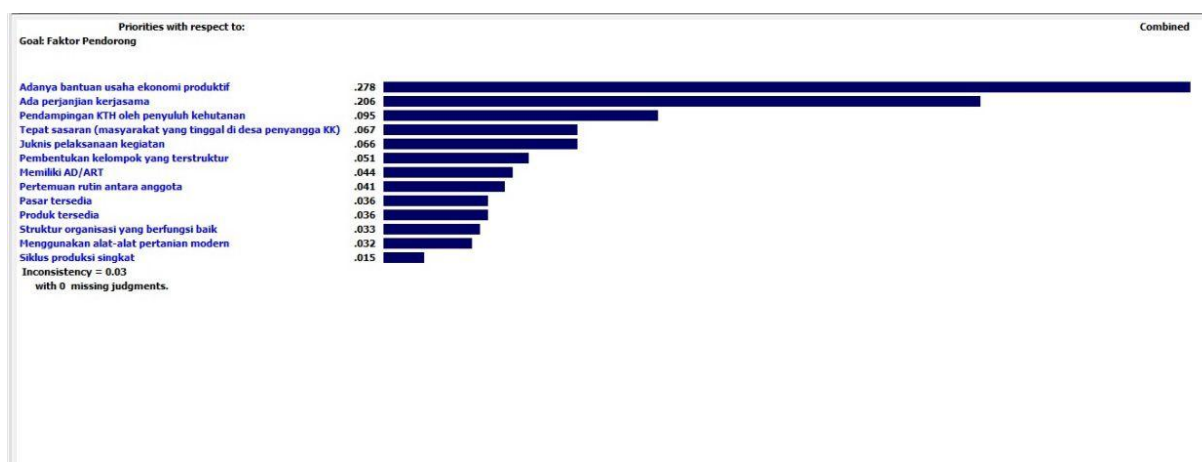
R = Nilai rata-rata (hasil penilaian dari kuisisioner responden)

3.4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi. Penentuan indikator prioritas, mengacu kepada hasil *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menggunakan *software Expert Choice versi 11*. Pada metode AHP ini, para pakar memberikan evaluasi tentang seberapa pentingnya setiap alternatif program yang telah diidentifikasi dalam mendukung pencapaian strategi. Penentuan indikator prioritas berdasarkan AHP akan menjadi acuan bagi para pihak dalam melakukan intervensi program secara efektif dan tepat sasaran Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian AHP berikut.

1. Faktor Pendorong

Hasil AHP pada faktor pendorong kegiatan pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi disajikan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3. Hasil Analisis Pakar Terhadap Alternatif Faktor Pendorong Pemberdayaan KTH Melalui Kemitraan Konservasi

Hasil AHP pada gambar 2.3. menunjukkan bahwa adanya bantuan usaha ekonomi produktif memiliki bobot tertinggi diantara alternatif lainnya, yakni sebesar 0.278. Hal ini menjelaskan bahwa adanya bantuan usaha ekonomi produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Maka dari itu, alternatif ini akan menjadi prioritas dalam pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Setelah diidentifikasi alternatif prioritas selanjutnya kita menentukan skor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2. Matriks Faktor Pendorong (*Driving Force*) dari Hasil AHP

Variabel	Bobot	Rating	Skor (BxR)
Juknis pelaksanaan kegiatan	0.066	3.78	0.24
Pembentukan kelompok yang terstruktur	0.051	3.19	0.16
Tepat Sasaran (masyarakat yang berada di desa penyangga KK)	0.067	3.78	0.25
Pendampingan KTH oleh penyuluh kehutanan	0.095	4.37	0.41
Struktur organisasi yang berfungsi baik	0.033	2.59	0.08
Pertemuan rutin antara anggota	0.041	2.78	0.11
Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	0.044	3.59	0.15
Adanya bantuan usaha ekonomi produktif	0.278	4.81	1,33
Ada perjanjian Kerjasama	0.206	4.41	0.90
Siklus produksi singkat	0.015	1.96	0.02
Menggunakan alat-alat pertanian modern	0.032	2.81	0.08
Pasar tersedia	0.036	3.63	0.13
Produk tersedia	0.036	3.85	0.14

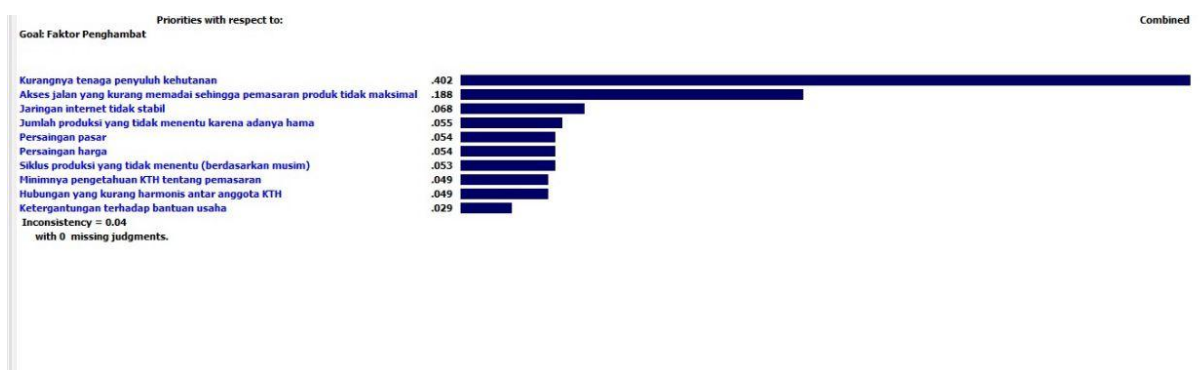
Ket : Bobot (B) : Hasil Analisis Penilaian Seluruh Pakar,

Rating (R) : Hasil nilai rata-rata dari data kuisioner responden

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai skoring tertinggi berada pada variabel adanya bantuan usaha ekonomi produktif dengan nilai skor 1,33. Hal ini menjelaskan bahwa adanya bantuan usaha ekonomi produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Maka dari itu, alternatif ini akan menjadi prioritas dalam pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi.

2. Faktor Penghambat

Hasil AHP pada faktor penghambat kegiatan pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi disajikan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Hasil Analisis Pakar Terhadap Alternatif Faktor Penghambat Pemberdayaan KTH Melalui Kemitraan Konservasi

Hasil AHP pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa kurangnya tenaga penyuluh kehutanan memiliki bobot tertinggi diantara alternatif lainnya, yakni sebesar 0.402. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya tenaga penyuluh kehutanan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Maka dari itu, alternatif ini akan menjadi prioritas dalam pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Setelah diidentifikasi alternatif prioritas selanjutnya kita menentukan skor lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Matriks Faktor Penghambat (*Restraining Force*)

Variabel	Bobot	Nilai	Skor
Jaringan internet tidak stabil	0.068	3.60	0.24
Kurangnya tenaga penyuluh kehutanan	0.402	4.63	1.86
Siklus produksi yang tidak menentu (berdasarkan musim)	0.053	1,78	0.05
Minimnya pengetahuan terkait pemasaran	0.049	3.19	0.15
Hubungan KTH kurang harmonis	0.049	3.60	0.17
Ketergantungan terhadap bantuan usaha	0.029	2.82	0.08
Jumlah produksi yang tidak menentu karena adanya hama	0.055	1.60	0.08
Akses jalan yang kurang memadai	0.188	4.37	0.82
Persaingan harga	0.054	3.60	0.19
Persaingan pasar	0.054	3.62	0.20

Ket : Bobot (B) : Hasil Analisis Penilaian Seluruh Pakar,

Rating (R) : Hasil nilai rata-rata dari data kuisisioner responden

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai skor tertinggi berada pada indikator kurangnya tenaga penyuluh kehutanan dengan nilai skor 1,86. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya tenaga penyuluh kehutanan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Maka dari itu, alternatif ini akan menjadi prioritas dalam pemberdayaan KTH melalui kemitraan konservasi. Untuk perhitungan nilai bobot dan data kurva tiap pakar akan dilampirkan,

3.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Data bobot yang diperoleh dari para pakar dan nilai (yang diperoleh dari kuisisioner responden terdapat 13 (tiga belas) indikator faktor pendorong dan 10 (sepuluh) indikator faktor penghambat.
2. Faktor pendorong yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi yaitu pada indikator adanya bantuan usaha ekonomi produktif.
3. Faktor penghambat yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi yaitu pada indikator kurangnya tenaga penyuluh kehutanan

2.6 Daftar Pustaka

Ansahri, Awaludin Isya, dan Mikhratunnisa. 2023. Strategi Pengembangan Agroindustri Minyak Sumbawa di Desa Kalungkung Kecamatan Batulanteh. Jurnal Teknologi Pangan dan Ilmu Pertanian 1 (2) : 10-30

- Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 24.
- Coristya, B.R., Ribawanto, H., Suwondo. 2013. Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(6): 1068-1076
- Daniel Sulekale, Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ARTIKEL+DANIEL+SULEKALE &btnG pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Pukul 11.58 WIB.
- Engkus Kusmana, Regi Refian Garis, "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", *Jurnal Moderat*, 2019, 463-464.
- Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P. 57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. Jakarta (ID): Kemenhut
- Saaty, T.L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process*, New York : McGraw-Hill.
- Saipurrozi, Indra G, Hari K, Christine W. 2018. Uji coba program kemitraan konservasi di kemitraan unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal hutan tropis* 9(1): 35-42.
- Sasono, I., Riyanto, R., Suroso, S., Aman, M., & Iskandar, J. 2023. Design of web based applications in agrotourism information systems using the SWOT analysis method. *Journal of Information Systems and Informatics*, 5(3), 971–983. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i3.508>
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017),